



Pengolahan Sampah Bawuran Belum Optimal

**BANTUL-Gubernur DIY
Sri Sultan Hamengku
Buwono X menilai kinerja
pengolahan sampah
Intermediate Treatment
Facility (ITF) Bawuran di
Kabupaten Bantul belum
optimal.**

*Yosef Leon, Catur Dwi Janati & Akbar
Evandio
redaksi@jbinews.co*

Menurutnya, kapasitas pengolahan sampah di fasilitas tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal padahal sudah beroperasi kurang lebih enam bulan sejak Maret lalu. "Saya kira prosesnya sudah bagus, hanya kapasitasnya tidak sesuai. Dulu kan targetnya 40 ton per hari, tapi faktanya tidak sampai segitu. Akhirnya hanya 25 ton," ujar Sultan saat meninjau pengolahan sampah di lokasi tersebut, Selasa (21/10).

Sultan menyebut sejak TPA Piyungan ditutup, ITF Bawuran

► **Kapasitas pengolahan sampah di ITF Bawuran tidak sesuai dengan perencanaan awal padahal sudah beroperasi kurang lebih enam bulan.**

► **Percepatan proyek WTE dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.109/2025 tentang Waste to Energy.**

awalnya diproeksikan menjadi salah satu bagian dari pengembangan teknologi pengolahan sampah di DIY. Namun, evaluasi menyeluruh tetap dibutuhkan agar pengelolaan sampah di tiap kabupaten dan kota bisa lebih efisien dan maksimal ke depannya. "Kami akan bicarakan lebih lanjut dengan bupati dan wali kota dulu, mana yang paling efisien dalam menyelesaikan masalah sampah di DIY," kata Sultan.

Pengolahan Sampah...

Kunjungan tersebut dilakukan sesuai Gubernur DIY bersama para bupati dan wali kota melakukan rapat koordinasi terkait pengolahan sampah di wilayah regional DIY di Kapatihan.

Selain itu, kunjungan itu sebagai bagian dari upaya menyamakan visi penanganan sampah di DIY. Ada dua opsi yang sedang dibahas, apakah pengelolaan sampah dilakukan mandiri oleh pemerintah daerah atau menyerahkannya kepada Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk memutuskan hal tersebut, Pemda DIY dan pemerintah kabupaten dan kota akan terus melakukan koordinasi agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.

Tenaga Ahli PD Aneka Darma selaku pengelola ITF Bawuran, Imam Santoso mengakui kapasitas pengolahan saat ini memang masih di angka 25-30 ton per hari, jauh dari target 40 ton. Hal itu, kata dia dipengaruhi oleh pembatasan jumlah sif kerja dan karakter sampah yang dominan basah.

"Kami hanya menjalankan dua sif, tidak sampai tiga karena biaya operasional dan tenaga kerja cukup tinggi. Selain itu, 80 persen sampah yang kami terima dari Kota [Jogja] dan Bantul itu basah, sehingga perlu perlakuan tambahan saat dibakar," jelas Imam.

Pihaknya kini tengah melakukan peningkatan sistem dan teknologi, termasuk menambah efisiensi alat pencacah sampah dan menambahkan bahan kayu serta daun sebagai penopang pembakaran untuk menjaga

kadar kalori dan kualitas abu hasil pembakaran.

Imam menyebut, ke depan ITF Bawuran akan beradaptasi dengan proyek *waste to energy* yang sedang dikembangkan pemerintah.

Siap Bergabung

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan Pemkab Sleman siap berkomitmen dan bekerja sama dengan Pemda DIY dalam penanganan sampah secara bersama-sama.

"Semua bupati, wali kota oke, bisa bergabung dengan provinsi berkaitan dengan penanganan sampah," ungkap Harda.

Jika kelak penanganan sampah akan terpusat di Piyungan, Harda mengatakan fasilitas TPST Tamanmartani yang ada di Sleman akan tetap digunakan. "Pemikiran kami, nanti berkaitan dengan produksi sampah ini kan ada pelaku-pelaku swasta yang notabene selama ini masih berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Harda berencana mengoordinasikan rencana ini dengan pelaku-pelaku swasta. Dengan demikian TPST di Sleman tetap dapat beroperasi, menyerap tenaga kerja dan tetap bermanfaat.

Percepat Proyek

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan proyek WTE kini telah memasuki tahap verifikasi lapangan di 33 lokasi kabupaten/kota dan segera dibangun oleh PT Danantara Energi Nusantara, perusahaan pelaksana yang ditunjuk pemerintah. "Presiden meminta agar pembangunan

waste to energy ini dilakukan secara bertahap di 33 lokasi. Saat ini tim gabungan sudah melakukan verifikasi lapangan dan diserahkan ke Danantara. Sekarang sedang proses pembangunan," ujar Hanif sesuai Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10) malam.

Hanif menjelaskan percepatan proyek ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.109/2025 tentang *Waste to Energy*, yang menjadi payung hukum baru pengelolaan sampah berbasis energi di Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah telah menetapkan 326 kabupaten/kota sebagai daerah darurat sampah, agar dapat segera mengakses berbagai sumber pendanaan untuk penanganan limbah. "Dengan keluarnya Perpres 109, kami menetapkan 326 kabupaten/kota sebagai kabupaten darurat sampah. Artinya, mereka bisa mengakses pendanaan dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan sistem pengolahan," jelasnya.

Untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah, KLH menyiapkan tiga skema utama teknologi pengolahan yakni WTE yaitu sistem insinerasi besar yang mengubah sampah menjadi listrik. Lalu ada *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang merupakan teknologi yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen dan pembangkit. Kemudian, TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*) sebagai fasilitas pengolahan berbasis masyarakat di tingkat kelurahan dan desa. (Bisnis.com/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005